

Law Review

Volume X, No. 1 - Juli 2010

PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA

Peran Negara Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi

FX Joko Priyono (FH Universitas Diponegoro, Semarang)

Persaingan Pasar Ritel di Indonesia: Pasar Modern versus Pasar Tradisional

Yakub Adi Krisanto (FH Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga)

Legal Aspect Warehouse Receipt in the Banking Activities

Ramlan Ginting (Bank Indonesia, Manado)

General Agreement on Trade in Services (GATS) dan Kedaulatan Hukum di Bidang Ekonomi

Mahmul Siregar (FH Universitas Sumatera Utara, Medan)

Landasan Hukum Atas Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas

Dhaniswara K. Harjono (Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UKI, Jakarta)

Harmonisasi Instrumen Hukum Nasional Menuju Kerjasama Regional Dalam Penanggulangan "Cyber Crime" di Kawasan Negara ASEAN

Ahmad M. Ramli (BPHN, Kementerian Hukum dan HAM)

On Microfinance, Financial Self-Sustainability, and Mission Drift

Jamie Williams (FH Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang)

Penyelesaian Sengketa di Arbitrase Salah Satu Cara Untuk Menghindari Mafia Peradilan

Frans H. Winarta (FH Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang)



UPH Fakultas Hukum
Universitas Pelita Harapan



Law Review

“Law Review” adalah Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, didirikan tahun 2001, terbit pertama kali bulan Juli 2001 dan terbit secara berkala 3 (tiga) kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Juli, November dan Maret. Penggunaan nama “Law Review” (dalam Bahasa Inggris) untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi UPH sebagai Global Practice Campus. Kata “Law Review” secara etimologi dari Bahasa Inggris, law artinya hukum dan review artinya tinjauan. Law Review merupakan tinjauan/kajian hukum sebagai wadah informasi ilmiah dibidang hukum yaitu berupa hasil karya penelitian ilmiah, dan atau tulisan ilmiah hukum (berbentuk kajian)

SUSUNAN PENGURUS JURNAL LAW REVIEW

PENANGGUNG JAWAB

Prof. Dr. Bintang R. Saragih, SH
(Dekan Fakultas Hukum UPH)

PIMPINAN REDAKSI

Dr. jur. Udin Silalahi, SH., LL.M

DEWAN REDAKSI

Dr. Eduard I. Hahuly, SH., LL.M.
Dr. Hardijan Rusli, SH, MM, M.Acc
Jessica Los Banos, LLB, MTM, MBA.
Meray Hendrik Mezak, SH., MH.
Jamin Ginting, SH., MH.
Agus Budianto, SH., MHum
Vincensia Esti Purnama Sari, SH., M.Hum.
Christine Susanti, SH., M.Hum.
Susi Sutantijo, SH., LL.M

SEKRETARIS REDAKSI DAN BENDAHARA

Theresia Rini Stiani, SE

ALAMAT REDAKSI

Jl. M.H. Thamrin Boulevard 1100
Kampus UPH Gedung D Lt. 4, Sekretariat Fakultas Hukum
Tangerang 15811, Banten-Indonesia
Telp: (021)5460901; Fax: (021)5460910

DAFTAR ISI

Vol. X, No. 1	LAW REVIEW	Juli 2010
ISSN NO. : 1412 - 2561		Halaman
Peran Negara Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi FX Joko Priyono (FH Universitas Diponegoro, Semarang)		1 - 16
Persaingan Pasar Ritel di Indonesia: Pasar Modern versus Pasar Tradisional Yakub Adi Krisanto (FH Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga)		17 - 38
Legal Aspect Warehouse Receipt in the Banking Activities Ramlan Ginting (Bank Indonesia, Manado)		39 - 50
General Agreement on Trade in Services (GATS) dan Kedaulatan Hukum di Bidang Ekonomi Mahmul Siregar (FH Universitas Sumatera Utara, Medan)		51 - 70
Landasan Hukum Atas Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas Dhaniswara K. Harjono (Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UKI, Jakarta)		71 - 84
Harmonisasi Instrumen Hukum Nasional Menuju Kerjasama Regional Dalam Penanggulangan "Cyber Crime" di Kawasan Negara ASEAN Ahmad M. Ramli (BPHN, Kementerian Hukum dan HAM)		85 - 102
On Microfinance, Financial Self-Sustainability, and Mission Drift Jamie Williams (FH Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang)		103 - 124
Penyelesaian Sengketa di Arbitrase Salah Satu Cara Untuk Menghindari Mafia Peradilan Frans H. Winarta (FH Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang)		125 - 139

Kata Pengantar

Disadari atau tidak, krisis ekonomi dan moneter yang menerpa Indonesia pada pertengahan tahun 1997 ikut mendorong pembangunan (baca: pembaharuan) hukum ekonomi di Indonesia. Krisis ekonomi tersebut tidak dapat dipulihkan sendiri oleh Pemerintah Republik Indonesia. International Monetary Fund (IMF) menawarkan dana bantuan sebesar 43 miliar US Dolar kepada Pemerintah Indonesia untuk dapat melakukan pemulihan ekonomi. Pemerintah Indonesia menerima bantuan dari IMF tersebut pada bulan Januari 1998 dengan menandatangani Letter of Intent (LoI). Akan tetapi IMF mengajukan suatu persyaratan untuk mencairkan dana bantuan tersebut, yaitu beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ekonomi harus diundangkan (dimiliki) oleh Pemerintah Indonesia. Untuk itu mau tidak mau Pemerintah Indonesia harus melakukan pembaharuan hukum.

Pembaharuan hukum mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat, karena masyarakat selalu dinamis dan berkembang. Selain itu faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan *stability*, *predictability* dan *fairness*. Untuk itulah sejak era reformasi, Pemerintah Indonesia bersama DPR telah banyak menerbitkan peraturan perundang-undangan dibidang hukum ekonomi antara lain seperti UU No. 10/1998 tentang Perbankan; UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat; UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No. 9/1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi; UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi; UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang, UU No. 26/2006 tentang Sistem Resi Gudang, dan lain-lain.

Jadi, sejak era reformasi sampai sekarang banyaknya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah dibidang hukum ekonomi untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan guna mendorong pertumbuhan (pembangunan) ekonomi. Dalam kaitan inilah Redaksi Law Review melihat betapa hukum ekonomi mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu Redaksi Law Review pada edisi bulan Juli 2010 ini memilih tema utama tentang Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia. Begitu banyak hukum ekonomi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah, akan tetapi dalam Law Review edisi bulan Juli 2010 ini akan disajikan hanya beberapa isu, yaitu sebagai tulisan utama yang pertama adalah tentang Peran Negara Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi yang ditulis oleh Dr. FX Joko Priyo, SH, MHum, dari FH Universitas Diponegoro, Semarang. Dalam tulisan ini dipaparkan betapa pentingnya peran Negara

dalam pembangunan hukum sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuannya yaitu untuk mensejahterahkan masyarakat umum.

Upaya Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada pelaku usaha dalam berusaha di era reformasi, Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan di bidang hukum ekonomi, salah satu diantaranya adalah UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) yang menjamin setiap pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. UU No. 5/1999 memberikan jaminan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha dan sekaligus memberikan aturan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus secara sehat (*fair*). Tulisan kedua yang ditulis oleh Yakub Adi Krisanto, SH., M.H dari FH Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, mengupas mengenai persaingan di pasar retail, khususnya persaingan antara pasar modern dan pasar tradisional. Dan tulisan ketiga adalah mengenai UU No. 26/2006 tentang Sistem Resi Gudang yang ditulis oleh Dr. Ramlan Ginting dari Bank Indonesia. Tulisan ini memaparkan tentang resi gudang, bagaimana resi gudang menjadi dokumen hukum yang dijadikan jaminan utang. Dengan demikian resi gudang menjadi salah satu dokumen hukum yang dapat mendorong kegiatan usaha di Indonesia. Sedangkan tulisan keempat ditulis oleh Dr. Mahmud Siregar, SH.,MH dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan mengenai General Agreement on Trades in Services (GATS) dan Kedaulatan Hukum Di Bidang Ekonomi. Tulisan ini mengkaji bahwa perdagangan internasional antara Negara sekarang ini tanpa hambatan batasan (*borderless*) baik di bidang barang-barang maupun di bidang jasa. Setelah Pemerintah Indonesia meratifikasi perjanjian pembentukan World Trade Organization (WTO) pada tahun 1994, maka perdagangan dalam negeri secara bertahap diliberalisasi termasuk di bidang jasa. Dalam tulisan ini akan dikaji apakah liberalisasi sektor jasa berdasarkan GATS menyebabkan kedaulatan internal di bidang ekonomi tunduk kepada kesepakatan internasional? Sehubungan dengan itu akan dianalisis lebih lanjut bagaimana eksistensi kedaulatan hukum suatu Negara peserta GATS? Bagaimana mengantisipasi agar *measure* yang diambil oleh Pemerintah Indonesia tidak menjadi permasalahan hukum ketika dihadapkan dengan GATS dan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi liberalisasi di sektor jasa? Sedangkan tulisan yang kelima adalah mengenai Landasan Hukum Atas Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perseroan Terbatas yang ditulis oleh Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH, MBA dari Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta. Dalam tulisan ini dipaparkan bagaimana tanggungjawab sosial dan lingkungan Perseroan dalam sistem

hukum Indonesia. Sedangkan tulisan keenam adalah berkaitan dengan hukum teknologi tentang Harmonisasi Instrumen Hukum Nasional Menuju Kerjasama Regional Dalam Penanggulangan “Cyber Crime” di Kawasan Negara Asean. Dalam tulisan ini dijelaskan bagaimana strategi hukum yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi Cyber dan prinsip-prinsip hukum apa saja yang harus diperhatikan oleh Negara-negara ASEAN dalam upaya harmonisasi hukum domestiknya agar selaras dengan prinsip-prinsip instrumen hukum internasional di bidang cybercrime.

Dan dua tulisan pendamping dalam edisi bulan Juli 2010 ini ditulis oleh Jamie Williams dari FH Universitas Pelita Harapan, Karawaci, tentang On Microfinance, Financial Self-Sustainability, and Mission Drift. Tulisan ini menjelaskan Lembaga Keuangan Mikro yang menyediakan layanan keuangan bagi klien yang berpenghasilan rendah dan miskin dan akan dianalisis, apakah Lembaga Keuangan Mikro dapat melakukan peran ganda sekaligus, yaitu melakukan misi sosialnya dan juga meningkatkan keuntungannya. Tulisan pendamping kedua ditulis oleh Dr. Frans H. Winarta, SH., MH dari FH Universitas Pelita Harapan tentang Penyelesaian Sengketa di Arbitrase Salah Satu Cara Menghindari Mafia Peradilan. Dalam tulisan ini akan dijelaskan bahwa untuk menghindari mafia peradilan yang terjadi akhir-akhir ini, pelaku usaha dapat memilih Arbitrase sebagai salah satu lembaga dalam penyelesaian sengketa diantara para pelaku usaha, tentu saja harus disepakati terlebih dahulu di dalam suatu perjanjian oleh para pihak.

Kepada pembaca Law Review yang setia, Redaksi mengucapkan selamat membaca tulisan-tulisan tersebut secara kritis dan semoga bermanfaat.

Redaksi Law Review
Fakultas Hukum – UPH

**THE CONTENT OF THIS PUBLICATION IS THE SOLE
RESPONSIBILITY OF THE RESPECTIVE AUTHORS AND
SHOULD IN NO WAY BE TAKEN TO REFLECT THE VIEWS OF
LAW REVIEW AND FACULTY OF LAW UNIVERSITAS PELITA
HARAPAN, KARAWACI, TANGERANG.**

LANDASAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERBATAS

Dhaniswara K. Harjono

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UKI, Jakarta

dhanis@dhaniswara.com

Abstract

Social and environmental responsibility is a company's responsibility that should be calculated as accounted for as corporate expenditure in which the implementation is carried out by taking due care and due diligence into consideration, which if it is not performed properly shall be penalized in accordance with applicable rules and regulations. Business activities performed by major corporations nowadays have become a powerful force that has to be followed by social and environmental responsibility which benefits the public. To provide legal security in performing those social responsibilities, it requires legal grounds that can give a sense of fairness to all stakeholders therefore giving the greatest benefit to public welfare.

Keywords: *corporate social responsibility, law no. 40/2007*

A. Pendahuluan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan materi baru dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan adopsi dari konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang telah dianut secara internasional. Konsep ini didasari oleh pendapat Milton Friedman, tahun 1962 yang merupakan bapak dari neoliberalisme (*neoliberalism*) dalam bukunya *Capitalism and Freedom*,¹

Few trends could so thoroughly undermine the very foundations of our free society as the acceptance by corporate officials of a social responsibility other than to make as much money for their stockholders as possible.

¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Corporate Responsibility*, Jurnal Hukum Bisnis - Volume 26 - No. 3 Tahun 2007, hal. 57

Menurutnya tanggung jawab perusahaan adalah

To conduct the bussiness in accordance with (owners or shareholders) desires, which generally will be to make as much money as possible while conforming to the basic rules of society, both those embodied in law and those embodied in ethical custom.

Jadi, menurut pendiri neoliberalisme tersebut, satu satunya tujuan dan *responsibility* perusahaan adalah memaksimalkan pendapatan dan kekayaan perusahaan bagi pemegang sahamnya. Pendapat ini telah melahirkan banyak sekali perusahaan besar yang menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab dan bersikap anti sosial dan melakukan praktik-praktik tidak manusiawi, dimana mereka memperlakukan para pegawai dan pekerja secara tidak manusiawi, membajak pegawai perusahaan lain dengan menawarkan gaji dan fasilitas yang lebih baik, memproduksi barang yang mengganggu kesehatan, menghancurkan perusahaan lain, melakukan praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat, melakukan pencemaran lingkungan, praktik-praktik penyuapan, dan lain-lain.

Akibat praktik-praktik tidak sehat tersebut, maka beberapa tahun terakhir ini, dunia telah menerapkan prinsip *corporate social responsibility* (SCR) baik untuk *social responsibility* maupun *competitive advantage*. Saat ini CSR sudah menjadi suatu keharusan bagi institusi publik, dunia usaha, para pemberi kerja, organisasi-organisasi madani. Dalam hal ini perusahaan harus memberikan kontribusi yang baik kepada publik dan memperlakukan pegawai dan buruh dengan harga diri dan kehormatan. Oleh karenanya kesadaran pentingnya melakukan CSR merupakan *trand global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan *stakeholders*.

Dengan gagasan CSR diharapkan bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpihak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan (*financial*) saja, tetapi juga perusahaan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan (*triple bottom line*). Kondisi keuangan saja tidak

cukup menjamin nilai pertumbuhan secara berkelanjutan (*sustainable*). Berkelanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup, dimana telah menjadi fakta bahwa resistensi masyarakat sekitar muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan lingkungan hidup.²

Tanggung jawab sosial perseroan terbatas terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak asasi manusia, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan, serta bantuan bencana kemanusiaan.

Berdasarkan uraian di atas, perumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan dalam sistem hukum Indonesia?

B. Pembahasan

1. Arti Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diistilahkan dengan *Corporate Social Responsibility* atau *Business Social Responsibility*. Menurut Michael Hopkins dalam *working paper* yang disampaikan kepada *Policy Integration Department World Commission on the Social Dimension of Globalization*, CSR didefinisikan dengan,

CSR is concerned with treating the stakeholders of the firm ethically or in responsible manner, ethically or responsible means treating stakeholders in a manner deemed acceptable in civilized societies. Social includes economic responsibility. Stakeholders exist within a firm and outside. The natural environment is a stakeholder. The wider aim of social responsibility is to create higher standards of living, while preserving the profitability of the corporation, for peoples both within and outside the corporation.

2 Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (Undang Undang No. 40 Tahun 2007)*, Cet. Pertama, (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 94

Lebih lanjut Hopkins mengemukakan bahwa *CSR therefore means the ethical behavior of bussiness towards its constituencies or stakeholders.*³

Dalam Wikipedia, *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah:

*Concept which encourages to consider the interest of society by taking responsibility for the impact of the organizatio's activities on customers, employees, sharesholders, communities and the environment in all aspects of its operations. This obligation is seen to extend beyond the statutory obligations voluntary taking futher steps to improve the quality of for employees and their families as well as for the local community and society at large.*⁴

World Business Council for Sustainable, memberikan definisi,

CSR adalah suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaanya beserta seluruh keluarganya.⁵

CSR merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala sesuatu atau segala hal (*stakeholders*) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan tersebut untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan usaha (*sustainability*) perusahaan tersebut.⁶

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* adalah konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki tanggung jawab terhadap

3 Sutan Remy Sjahdeni, *op.cit.*, hal. 59

4 http://wikipedia.org/wiki/corporate_social_responsibility.

5 Jamin Ginting, *op.cit.*, hal. 95

6 Gunawan Widjaja, *Dampak Pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2007 Terhadap Dunia Usaha di Indonesia (Tinjauan Terhadap Pasal 74 UUPT)* Makalah dalam Seminar Menyongsong Berlakunya UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Diamond Room, Nikko Hotel Jakarta, 6 September 2007, hal. 4

konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata hanya berdasarkan faktor keuangan belaka, seperti halnya keuntungan atau deviden, tetapi juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan, baik untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.⁷

CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bukan suatu bentuk tanggung jawab dalam pengertian harafiah. Namun merupakan *moral obligation* perusahaan terhadap keadaan ekonomi, keadaan sosial dan keadaan lingkungan yang terkait dengan kegiatan usaha atau jalannya perusahaan secara berkesinambungan yang tidak harus sama antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Diselenggarakan oleh perusahaan atas biaya perusahaan untuk kepentingan semua *stakeholders* perusahaan yang meliputi pemegang saham, kreditor, Direksi dan Dewan Komisaris, karyawan, rekanan usaha, *supplier*, *distributor*, pemerintah, konsumen dan lingkungan, dimana biaya penyelenggaraan CSR tersebut tidak boleh merugikan kepentingan dari salah satu *stakeholders* tersebut.

Dilihat dari sudut pandang hukum bisnis, setidaknya ada dua tanggung jawab yang harus diajarkan dalam etika bisnis, yaitu tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) yang meliputi aspek perdata (*civil liability*), dan aspek pidana (*crime liability*), dan aspek tanggung jawab sosial (*social responsibility*) yang dibangun di atas landasan norma moral yang berlaku di dalam masyarakat. Artinya, sekalipun suatu kegiatan bisnis secara hukum (perdata dan pidana) tidak melanggar undang-undang atau peraturan, tetapi bisnis tersebut dilakukan dengan melanggar moral masyarakat atau merugikan masyarakat, maka bisnis tersebut dianggap sebagai perbuatan tidak etis (*unethical conduct*).⁸

7 Jamin Ginting, *op.cit.*, hal. 95

8 Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, Edisi Kedua, (Jogjakarta: Kraesi Total Media Yogyakarta, 2009), hal. 138

Undang Undang No. 40 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (3) memberikan definisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.⁹

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau CSR termuat dan tercermin dalam *code of conducts*, *code of ethics*, *corporate policy*, *statement of principles* masing-masing perusahaan yang dapat berbeda satu dengan yang lainnya.

Wujud tanggung jawab sosial perusahaan dapat dirumuskan dalam dua wujud, yaitu :¹⁰

- a. Positif : Melakukan kegiatan –kegiatan yang bukan didasarkan pada perhitungan untung rugi, melainkan didasarkan pada pertimbangan demi kesejahteraan sosial.
- b. Negatif : Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dari segi ekonomis menguntungkan, tetapi dari segi sosial merugikan kepentingan dan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian jelas bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan rasa kepedulian sosial perusahaan terhadap segala hal yang berhubungan dengan harmonisasi antara tanggung jawab ekonomi dan tanggung jawab sosial.

2. Orientasi Tanggung Jawab Sosial Bagi Perusahaan

Menurut Sutan Remy Sjahdeni¹¹, terdapat beberapa faktor pendorong mengapa perusahaan harus menerapkan CSR, yaitu :

1. Terjadinya perubahan nilai-nilai. Perusahaan banyak yang secara sukarela mengubah orientasinya, yaitu dari semula hanya

9 Indonesia, *Undang Undang Tentang Perseroan Terbatas*, U.U. No. 40 Tahun 2007, L.N. No. 106 Tahun 2007, T.L.N. No. 4756, Pasal 1 ayat (3)

10 A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hal. 98

11 Sutan Remy Sjahdeni, *op.cit.*, hal. 60

mementingkan pemupukan pendapatan dan keuntungan yang sebesar-besarnya menjadi harus pula bertanggung jawab terhadap masyarakat, baik masyarakat lokal dimana mereka berada maupun masyarakat dunia dan terhadap lingkungan bisnisnya. Ini merupakan perubahan sikap moral dari perusahaan yang telah mendorong perusahaan untuk mengubah nilai-nilai yang berlaku sebagai budaya kerja perusahaan tersebut.

2. Strategi. Oleh karena telah terjadi perubahan orientasi, dimana perusahaan harus bertanggung jawab terhadap masyarakat dan terhadap lingkungan, maka strategi perusahaan juga harus disesuaikan.
3. *Public Pressure*. Berbagai kelompok LSM, konsumen, media, negara dan badan-badan publik lainnya telah menuntut dengan keras agar perusahaan-perusahaan lebih bertanggung jawab terhadap masyarakat, baik masyarakat lokal dimana mereka berada maupun masyarakat dunia.

Berbagai kebijakan atau keputusan perusahaan sudah tentu berkaitan untuk kemajuan, keberhasilan perusahaan secara keseluruhan, apabila berbagai kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan menumbuhkan iklim berusaha yang sehat, begitu juga apabila kebijaksanaan ataupun keputusan perusahaan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka peraturan perundang-undangan yang ada telah menentukan sanksinya yang memaksa.¹²

Perkembangan aset dan perkembangan keuntungan yang dialami oleh perusahaan yang telah menerapkan CSR juga telah menjadi pendorong banyak perusahaan akhirnya menerapkan CSR ini.

Keberadaan CSR dewasa ini menjadi sangat penting. Hal ini terutama diakibatkan terjadinya globalisasi dan makin meningkatnya persaingan sebagai akibat globalisasi tersebut. Demikian juga dari waktu ke waktu perusahaan menjadi semakin besar dan makin meningkat pula

12 Habib Adjie, Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas, (Bandung: CV Mandar Maju, Bandung, 2008), hal. 69

pengaruh perusahaan-perusahaan tersebut yang memerlukan upaya-upaya penghematan dan reposisi pemerintah dan peranannya. Selain itu secara global telah terjadi perang di antara perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan tenaga-tenaga yang berbakat dan berkeahlian yang mengakibatkan pertumbuhan aktivitas masyarakat global, serta makin meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya aset-aset tidak berwujud.

Oleh karenanya pelaksanaan CSR tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat namun memberikan manfaat langsung kepada perusahaan, dimana konsumen bukan hanya sekedar memilih untuk membeli dari perusahaan-perusahaan yang melaksanakan usahanya secara etis bahkan menuntut akan hal itu. CSR telah meningkat secara dramatis setelah perusahaan menerapkan CSR. Oleh karenanya manfaatnya secara langsung adalah bahwa:

1. pelaksanaan CSR telah meningkatkan reputasi perusahaan;
2. reputasi yang baik tersebut memudahkan perusahaan untuk dapat melakukan rekrutmen pegawai yang berkualitas dan bereputasi baik;
3. para pegawai lebih betah untuk bekerja di perusahaan yang melaksanakan CSR sehingga perusahaan dapat mengurangi biaya yang timbul karena harus melakukan rekrutmen baru dan melakukan pelatihan pegawai-pegawai baru;
4. para pegawai lebih bermotivasi dan karena itu lebih produktif;
5. CSR membantu perusahaan untuk mematuhi ketentuan undang-undang;
6. keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas setempat menghasilkan liputan yang baik dari media mengenai perusahaan tersebut;
7. pelaksanaan CSR menghasilkan hubungan-hubungan yang baik dengan otoritas setempat dan hubungan-hubungan yang baik itu memudahkan bagi perusahaan untuk melakukan bisnisnya;
8. pelaksanaan CSR yang menghasilkan pengaruh yang luas bagi

bisnis perusahaan dapat membantu perusahaan untuk melakukan bisnisnya;

9. CSR dapat membuat perusahaan lebih kompetitif dan dapat mengurangi munculnya risiko yang akan mengakibatkan rusaknya reputasi perusahaan;
10. Para investor dan lembaga-lembaga pemberi pinjaman (antara lain bank-bank) bila mengetahui bahwa perusahaan, yaitu perusahaan dimana investor telah menanamkan dananya atau lembaga-lembaga yang memberikan pinjaman telah menerapkan CSR, akan lebih bersedia memberikan tambahan dana investasi atau memberikan tambahan kredit bagi perusahaan tersebut.

Manfaat tersebut akan dapat diperoleh maksimal, jika perusahaan dalam melaksanakan kebijakan CSR bertujuan tidak hanya memberikan manfaat finansial tapi juga komersial bagi perusahaan yang hanya dapat diperoleh oleh *stakeholders* sebagai penerima manfaat jika mereka mengetahuinya melalui sarana publikasi.

3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam UU No. 40 Tahun 2007

CSR atau tanggung jawab sosial merupakan suatu hak yang baru yang diadopsi oleh UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perseroan terhadap lingkungan dan keadaan masyarakat sekitar perseroan. Serta menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.¹³

¹³ Lihat Penjelasan Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Latar belakang pemikiran dimuatnya aturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam UUPT adalah adanya keinginan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan kewajiban perseroan tersebut. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam UUPT tersebut menyebutkan bahwa perseroan (perusahaan) usaha tertentu wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sebagaimana diatur dalam pasal 74 UUPT2007 :

- Ayat (1):

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

- Ayat (2):

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

- Ayat (3):

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penempatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Bab tersendiri, yaitu Bab 5 UUPT yang sejajar dengan organ PT yang mendapatkan pengaturan dalam Bab tersendiri yaitu Bab 6 tentang RUPS dan Bab 7 tentang Direksi dan Dewan Komisaris memperlihatkan *pertama* pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan ini direalisasikan oleh perseroan, dan *kedua* sebagai landasan atau pijakan bagi peraturan perundang-undangan lainnya yang bersentuhan dengan perseroan terbatas sebagai pelaku usaha, misalnya peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan, perasuransian, pembiayaan, pertambangan, energy, dan lain-lain yang kesemuanya dijalankan oleh badan usaha yang bernama Perseroan terbatas. Kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perseroan Terbatas juga hendak menampilkan sisi manusiawi atau sosial dan peka serta peduli lingkungan dari PT yang cenderung diberi label sebagai badan usaha yang senantiasa bertujuan untuk mendapatkan laba (keuntungan).¹⁴

Dalam ketentuan Pasal 74 tersebut, dibatasi bahwa yang harus melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, yaitu perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam dan atau perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Ketentuan Pasal 74 ayat (1) tersebut sangat sempit dan terbatas yaitu hanya perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha (mengolah) sumber daya alam yang berkewajiban untuk mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sesungguhnya tanggung jawab sosial mempunyai makna dan penertian yang luas tidak hanya terhadap lingkungan saja tapi juga terkait dengan aspek kehidupan masyarakat disekitarnya. Kehadiran perusahaan disuatu wilayah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi

¹⁴ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 97

bagi perusahaan tersebut tapi juga harus bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya khususnya dalam menaikkan taraf hidup secara bertanggung jawab.

Dari uraian tersebut dapat terlihat bahwa apa yang diatur dalam UUPT adalah jauh lebih sempit dari apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). UUPM tersebut menentukan bahwa setiap penanam modal antara lain mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.¹⁵

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan di perusahaan itu sendiri (internal) maupun diluar lingkungan perusahaan, yaitu masyarakat disekitar lingkungan perusahaan (eksternal). Perusahaan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar sudah selayaknya memikirkan kepentingan masyarakat disekitarnya, karena perusahaan sebenarnya juga merupakan bagian dari masyarakat.¹⁶

Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diatur dalam UUPT diilhami oleh pandangan yang berkembang belakangan ini yang mengajarkan Perseroan sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha ditengah-tengah kehidupan masyarakat, harus ikut bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat setempat. Landasan pandangan ini telah melahirkan konsep tanggung jawab sosial Perseroan yang bersumber dari nilai moral, bahwa Perseroan hidup dan berada ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kehidupan dan kelancaran kegiatan usaha Perseroan sangat tergantung dan terkait kepada lingkungan dan masyarakat yang bersangkutan. Perseroan harus mempunyai kepedulian (*concern*) terhadap masyarakat dimana

15 Lihat Pasal 5 dan 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

16 Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet.1, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hal.123

dia hidup dan berada. Perseroan ini tidak terlepas dari tanggung jawab memenuhi kepentingan publik.¹⁷

Dalam hal ini jelas bahwa Perseroan mempunyai tanggung jawab sosial yang meliputi tanggung jawab ekonomi dan tanggung jawab hukum, yang satu dengan lainnya tidak selamanya sejalan. Penerapan hukum, misalnya hukum lingkungan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal disekitar domisili usaha perseroan. Demikian pula dari segi ekonomis maka keberadaan perseroan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Kewajiban sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, dan apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar saat ini sudah merupakan kekuatan yang luar biasa besar yang harus diikuti oleh tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan suatu tanggung jawab yang ditetapkan oleh hukum berdasarkan ketentuan UUPT yang tidak sekedar tanggung jawab moral semata yang pelaksanaannya secara sukarela demi kepentingan masyarakat.

Pada dasarnya tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian dari etika bisnis suatu perusahaan yang mempunyai tanggung jawab ekonomi (mencari keuntungan) yang berdasarkan undang-undang juga harus mempunyai tanggung jawab sosial agar eksistensinya tetap terjamin dan masyarakat merasakan manfaat keberadaan perusahaan tersebut.

17 M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, ed.1, cet.2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 298

Sebagai landasan hukum di Indonesia yang mewajibkan Perseroan Terbatas melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan tercermin dengan dicantumkannya aturan mengenai hal-hal tersebut didalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Daftar Pustaka

- A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Jogjakarta : Kanisius, 1993
- Ginting, Jamin, *Hukum Perseroan Terbatas (Undang – Undang No. 40 Tahun 2007)*, Cet. Pertama, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 2007
- Gunawan Widjaja, *Dampak Pelaksanaan UUNo. 40 Tahun 2007 Terhadap Dunia Usaha di Indonesia (Tinjauan Terhadap Pasal 74 UUPT)*, Makalah dalam Seminar Menyongsong Berlakunya UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Diamond Room, Nikko Hotel Jakarta, 6 September 2007
- Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip – Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Bandung : CV Mandar Maju, 2008
- Harahap, M. Yahya , *Hukum Perseroan Terbatas*, ed.1, cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Nadapdap, Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. 1, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2009
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, Edisi Kedua, Jogjakarta : Kreasi Total Media Yogyakarta, 2009
- Simanjuntak, Cornelius dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Ed.1, Cet.1, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Sutan Remy Sjahdeni, *Corporate Responsibility*, Jurnal Hukum Bisnis - Volume 26– No. 3 Tahun 2007

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan didirikan pada tanggal 25 Juli tahun 1996, yang diprakarsai oleh Dr. (HC) Mochtar Riady. Program Strata Satu diawali dengan satu peminatan, yaitu Hukum Bisnis. Kemudian pada tahun 2003 ditambah 2 peminatan, yaitu peminatan Hukum Internasional dan Kemahiran Praktik Hukum. Kegiatan perkuliahan program Strata Satu berlangsung di Global Campus UPH Lippo Karawaci Tangerang dan dilaksanakan dalam dua pilihan bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Melalui keputusan BAN PT Depdiknas No. 06/BAN-PT/Ak-X/S1/VIII/2007 tanggal 3 Agustus 2007, Program Ilmu Hukum (Fakultas Hukum) UPH diakreditasi dengan Peringkat "A". Peringkat "A" ini diperoleh saat BAN PT telah melakukan perubahan-perubahan dalam manajemen "asesmen lapangan". Selain akreditasi dari BAN PT Depdiknas, Fakultas Hukum juga merupakan salah satu Fakultas di lingkungan Universitas Pelita Harapan yang mendapat Sertifikasi ISO 9001:2000 pada tanggal 23 April 2008.

Fakultas Hukum UPH aktif mengikuti beberapa kompetisi moot court (peradilan semu), baik nasional maupun internasional, seperti Lomba Debat Hukum Nasional Universitas Padjadjaran, Bandung; Kompetisi Moot Court Nasional Djoko Soetono, Yogyakarta; Phillip C. Jessup International Law Moot Court, Washington DC – USA; Stetson International Environmental Moot Court Competition, Florida – USA; Elsa Moot Court Competition, Taipei – Taiwan; dll. Melalui kompetisi-kompetisi tersebut, Fakultas Hukum UPH telah meraih beberapa penghargaan dan prestasi, antara lain memperoleh peringkat 13 dari ± 100 Universitas di seluruh dunia pada Phillip C. Jessup International Law Moot Court Competition tahun 2009; Juara I pada Lomba debat Hukum Nasional Universitas Padjadjaran tahun 2009; dll.

Selain Fakultas Hukum UPH aktif mengikuti beberapa kompetisi moot court, Fakultas Hukum UPH juga merupakan salah satu anggota ASLI (*Asian Law Institute*) bersama-sama dengan National University of Singapore, Australian National University, Chulalongkorn University, University of Queensland, Southern Cross University, Singapore Management University, Hanoi Law University, Thammasat University, La Trobe University, Kobe University, University of New South Wales, dan universitas-universitas lain di beberapa negara asia dan non-asia. Dan Fakultas Hukum UPH telah menjalin kerjasama dalam program *dual degree* dengan Murdoch University, Australia yang ditandatangani pada tanggal 18 Juni 2010.

